

## Analisis Tingkat Kemiskinan di Yogyakarta 2023-2024

<sup>1</sup>Dian Isnawati, <sup>2</sup>Rengganis Carissa Edgina, <sup>3</sup>Laelatul Qodriyah, <sup>4</sup>Aldila Kresnaresanti  
<sup>1</sup>Pendidikan Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

E-mail: dian.isnawati@unsoed.ac.id

### ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai pusat budaya, pendidikan, dan destinasi wisata utama di Indonesia. Namun, di balik reputasi tersebut, DIY masih menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2023–2024. Metode yang digunakan adalah metode riset digital dan studi literatur dengan teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber yang relevan dan terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY. Selain itu, faktor-faktor lain seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan juga turut mempengaruhi dinamika kemiskinan di DIY. Selama periode 2023-2024, tingkat kemiskinan di DIY mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pasca masa pandemi Covid-19 dan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya seiring pemulihan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan peningkatan pendapatan, pemerataan pembangunan, dan investasi pada sektor pendidikan serta kesehatan untuk menurunkan angka kemiskinan di DIY secara berkelanjutan.

**Kata kunci :** *kemiskinan di DIY, faktor kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, Ketimpangan pendapatan*

### ABSTRACT

The Special Region of Yogyakarta (DIY) is known as a center of culture, education, and a major tourist destination in Indonesia. However, behind this reputation, DIY still faces serious challenges related to poverty. This study aims to analyze the factors that influence the poverty rate in the Special Region of Yogyakarta (DIY) Province during the period 2023–2024. The method used is the digital research method and literature study with data and information collection techniques by reviewing and analyzing relevant and reliable sources. The results of the study show that the variables of per capita expenditure and the Human Development Index (HDI) have a significant effect on the poverty rate in DIY. In addition, other factors such as unemployment rate, economic growth, and income inequality also influence the dynamics of poverty in DIY. During the period 2023-2024, the poverty rate in DIY fluctuated, with an increase after the Covid-19 pandemic and a downward trend in the following years along with economic recovery. These findings emphasize the importance of policies to increase income, equitable development, and investment in the education and health sectors to reduce poverty rates in DIY in a sustainable manner.

**Keyword :** *poverty in DIY, poverty factors, Human Development Index, economic growth, unemployment, Income inequality*

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi dan isu struktural yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi global, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), pengentasan kemiskinan menempati prioritas utama karena dampaknya yang sistemik terhadap kualitas hidup, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di Indonesia, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas faktor makroekonomi seperti pertumbuhan jumlah penduduk, ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, serta fluktuasi inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Dinamika ini menuntut perhatian khusus, terutama ketika terjadi di wilayah yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar namun masih bergelut dengan angka kemiskinan yang persisten.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadirkan sebuah paradoks pembangunan yang menarik untuk dikaji. Dikenal luas sebagai kota pelajar, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata unggulan kedua di Indonesia setelah Bali, DIY memiliki modal sosial dan ekonomi yang kuat. Selain itu, DIY sering mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong tinggi di tingkat nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kinerja indikator kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya mampu mengeliminasi masalah kemiskinan secara drastis. Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan struktural di mana pertumbuhan sektor-sektor unggulan belum terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, atau adanya faktor-faktor lain yang menghambat peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

Berdasarkan rilis data terbaru dari

Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi kemiskinan di DIY menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun mengarah pada perbaikan. Pada periode September 2024, persentase penduduk miskin di DIY tercatat sebesar 10,40 persen. Angka ini menunjukkan tren positif berupa penurunan jika dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2024 yang mencapai 10,83 persen, serta Maret 2023 sebesar 11,04 persen. Secara nominal, jumlah penduduk miskin pada September 2024 adalah sebanyak 430,47 ribu jiwa, berkurang sekitar 15,1 ribu jiwa dibandingkan Maret 2024 dan berkurang 18 ribu jiwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun tren penurunan ini patut diapresiasi, angka 10,40 persen masih tergolong tinggi dan menuntut evaluasi kebijakan yang berkelanjutan agar penurunan dapat terjadi secara lebih akeleratif.

Lebih lanjut, kerentanan masyarakat miskin di DIY sangat dipengaruhi oleh komposisi Garis Kemiskinan (GK). Pada September 2024, Garis Kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp613.370,00 per kapita per bulan. Struktur GK ini didominasi oleh Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar 72,93 persen, sementara peran komoditas bukan makanan (GKBM) hanya menyumbang 27,07 persen. Dominasi komponen makanan ini mengindikasikan bahwa inflasi harga pangan (volatile food) memiliki sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi jumlah penduduk miskin. Selain itu, jika dilihat dari perspektif unit keluarga, rata-rata rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,32 orang anggota keluarga, yang berarti beban Garis Kemiskinan per rumah tangga mencapai Rp2.649.758,00 per bulan. Angka ini menjadi indikator krusial dalam mengukur kecukupan pendapatan minimum yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga di provinsi tersebut.

Melihat fakta empiris tersebut, penurunan angka kemiskinan di DIY tidak dapat dilepaskan dari berbagai variabel makroekonomi dan sosial yang melingkapinya. Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi lapangan kerja yang memadai dapat meningkatkan risiko pengangguran, yang pada

gilirannya memutus rantai pendapatan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merepresentasikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan seharusnya berkorelasi negatif terhadap kemiskinan, namun efektivitasnya perlu diuji kembali dalam konteks DIY. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam pengaruh variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran, tingkat pendapatan, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di DIY. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang komprehensif serta menjadi landasan bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

## 2. LANDASAN TEORI

### Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat, 2007: 4). Menurut Adisasmita (2006: 144) Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak memiliki cukup pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Orang yang hidup dalam kemiskinan sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dan kesempatan yang penting untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal.

### Teori Jumlah Penduduk

Malthus dalam bukunya *Essay on Population* berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur

(eksponensial), sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan hanya mengikuti deret hitung (aritmetika). Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan yang dapat mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan berbagai masalah sosial. Malthus menekankan pentingnya keseimbangan antara pertambahan jumlah penduduk dan persediaan bahan makanan. Jika jumlah penduduk tumbuh lebih cepat daripada pangan yang tersedia, maka daya dukung lingkungan akan menurun dan menyebabkan kemiskinan serta kelaparan. "Teori Malthus menekankan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, Jumlah penduduk harus seimbang terhadap persediaan bahan makanan, jika tidak akan terjadi masalah sosial seperti kemiskinan dan kelaparan." (Edmund Conway, 50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui, 2015). Sebagai perbandingan, teori Marxist yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa tekanan penduduk bukan pada bahan makanan, melainkan pada kesempatan kerja. Mereka juga berargumen bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produksi yang dihasilkan sehingga tidak perlu pembatasan penduduk. "Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produksi yang dihasilkan." Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama enam bulan atau lebih, termasuk warga negara asing yang bermaksud menetap.

## Teori Pengangguran

Kesenjangan pendapatan antara orang miskin dan kaya semakin melebar akibat meningkatnya pengangguran. Pengangguran menjadi salah satu faktor yang memperburuk kesenjangan kekayaan antara kota besar dan kecil, di samping kemiskinan dan pendidikan. Ketidaksetaraan pendapatan semakin parah dengan tingginya angka pengangguran. Jika kita dapat menurunkan tingkat pengangguran, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin dapat berkurang. Menurut statistik BPS 2018, tingkat setengah pengangguran di Indonesia lebih besar dari tingkat pengangguran terbuka di hampir semua wilayah mereka yang disebut "setengah pengangguran" adalah individu yang memiliki pekerjaan di bawah standar, sedangkan yang disebut "pengangguran terbuka" tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ini merupakan berita positif karena mayoritas orang Indonesia yang tidak bekerja sebenarnya termasuk dalam kategori setengah pengangguran.

## Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan laporan laba rugi perusahaan dan menjadi indikator penting dalam aktivitas ekonomi. Secara umum, pendapatan dapat diartikan sebagai hasil kerja atau aliran masuk aktiva yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Menurut Theodorus M.Tuanakotta (2011:35) "Pendapatan (Revenue) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Mengingat pentingnya sangat sulit mendefinisikan pendapatan sebagai unsur akuntansi pada dirinya sendiri. Seperti laba pendapatan adalah proses arus penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama suatu kurun waktu tertentu. Umumnya, pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter (uang). "Menurut Akbar (2009:563) "Pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan

aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan utang (atau sebuah kombinasi keduanya) dari pengantar barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas yang terus berlangsung" sedangkan Menurut Munandar (2006:18) "Pendapatan adalah suatu pertumbuhan asets yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertumbuhan assets yang disebabkan bertambahnya liabilities"

## Teori Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjadi indikator komposit yang cukup representatif untuk menggambarkan capaian kualitas pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia. Dalam perkembangannya IPM telah beberapa kali mengalami penyempurnaan terkait dengan metode penghitungan maupun indikator penyusunnya. Tinggi atau rendahnya nilai IPM di suatu wilayah sangat ditentukan oleh banyak faktor seperti karakteristik sosial budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia, kondisi geografis dan kualitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan program pembangunan sosial ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada berbagai tingkatan. IPM adalah indikator kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui tiga dimensi utama: standar hidup, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar, yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Daerah yang memiliki IPM tinggi biasanya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, karena penduduknya lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia (Oktaviani dan Qurrota A'yun, 2021).

### 3. METODOLOGI

Metode penelitian dengan studi literatur yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data dan informasi yang sudah tersedia dalam berbagai sumber tertulis, termasuk data statistik resmi dari BPS, untuk dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara studi literatur yaitu mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Studi ini bertujuan membangun landasan teori dan memperdalam pemahaman masalah yang diteliti. Data dari BPS digunakan sebagai data sekunder yang valid dan terpercaya. Data ini berupa statistik resmi yang dipublikasikan oleh BPS, misalnya data demografi, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang mendukung analisis dalam penelitian. Pendekatan Penelitian biasanya bersifat kualitatif deskriptif, di mana data-data yang diperoleh dari literatur dan BPS dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang sedang diteliti tanpa menggunakan analisis statistik inferensial yang kompleks. Teknik Analisis Data yang digunakan meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, pengeditan dan seleksi data agar relevan dengan fokus penelitian, kemudian melakukan analisis induktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Dengan demikian, metode penelitian studi literatur dengan data BPS adalah pendekatan kualitatif yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari literatur dan data statistik resmi BPS untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan mendalam.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial ekonomi yang mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Individu yang berada dalam kondisi miskin umumnya mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan serta peluang yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada tingkat individu, tetapi juga memiliki implikasi terhadap dinamika sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. Fenomena kemiskinan (poverty) menjadi permasalahan global yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, terutama negara berkembang dan negara dengan tingkat pembangunan yang masih tertinggal. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, masih memiliki sejumlah wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 15,64%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 70.740 jiwa. Di posisi selanjutnya terdapat Kabupaten Gunungkidul yang juga mencatatkan angka kemiskinan yang tinggi; meskipun data tahun 2023 tidak mencantumkan persentase secara eksplisit, angka tahun sebelumnya berada di kisaran 15%. Sebaliknya, Kota Yogyakarta mencatatkan tingkat kemiskinan terendah di DIY pada tahun 2023, yakni sekitar 6,26%. Secara keseluruhan, DIY merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa pada tahun tersebut, dengan persentase sebesar 11,04% atau sekitar 448.470 jiwa.

Pada tahun 2024, data BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo tetap menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di DIY, yakni sebesar 15,62%, diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul dengan 15,64%. Kota Yogyakarta kembali menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah, yaitu sekitar 6,26%. Adapun Kabupaten Bantul dan Sleman mencatatkan angka kemiskinan masing-masing sebesar 11,66% dan 7,46%. Secara agregat, tingkat kemiskinan di DIY tahun 2024 sebesar 10,83% atau sekitar 445.550 jiwa, menjadikan DIY masih sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa. Meskipun

demikian, terdapat tren penurunan kemiskinan sebesar 0,43% antara Maret dan September 2024. Penelitian ini turut merujuk pada teori Malthus yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memicu krisis pangan dan berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan. Beberapa variabel lain yang memengaruhi keterkaitan ini mencakup tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, serta tingkat pengangguran. Secara umum, tingkat pendidikan yang lebih baik dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi berkorelasi terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran yang tinggi justru berpotensi memperparah kondisi kemiskinan. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebesar 3,69%, menurun sebesar 0,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. TPT tersebut termasuk dalam 10 besar terendah secara nasional, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan, pada September 2024 persentase kemiskinan di DIY masih mencapai 10,40%, turun sebesar 0,43% dibandingkan dengan Maret 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka pengangguran menurun, kemiskinan tetap menjadi persoalan penting yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

Penurunan angka pengangguran memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Namun demikian, keberadaan faktor lain seperti tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di DIY juga memengaruhi dinamika kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS, terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY. Pada Maret 2024, kemiskinan di wilayah perdesaan menunjukkan tren penurunan, sedangkan di wilayah perkotaan justru mengalami sedikit peningkatan. Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan perkembangan yang positif, tercermin dari

meningkatnya tingkat hunian kamar dan jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kendati demikian, isu ketimpangan pendapatan masih menjadi perhatian utama, dengan rasio gini sebesar 0,428 pada September 2024. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Maret 2024 (0,435) dan September 2023 (0,449). Ketimpangan lebih besar tercatat di wilayah perkotaan (0,429) dibandingkan dengan perdesaan (0,355), meskipun terdapat perbaikan yang terlihat dari menurunnya proporsi pengeluaran pada kelompok 20% tertinggi dan meningkatnya pengeluaran pada kelompok 40% menengah serta 40% terbawah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, pertumbuhan ekonomi DIY sepanjang tahun 2024 mencapai 5,03%, sedikit melambat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan dan ketimpangan ini dipengaruhi oleh kondisi inflasi yang terkendali. Beberapa sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi DIY meliputi industri pengolahan sebesar 11,83%, akomodasi dan makanan minuman 10,59%, pertanian 9,92%, serta informasi dan komunikasi 9,80%. DIY mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa pada triwulan III 2024, dan kembali menempati posisi tertinggi pada triwulan IV 2024 dengan pertumbuhan 5,07%. Namun demikian, kontribusi DIY terhadap perekonomian Pulau Jawa hanya sebesar 1,54% dan terhadap nasional sebesar 0,88%. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, indikator kualitas hidup masyarakat menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah, salah satunya melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan teori yang telah dibahas, IPM mencerminkan tingkat pembangunan manusia yang diukur melalui tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat (diukur melalui angka harapan hidup saat lahir), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak (pendapatan riil per kapita). Pada tahun 2023, IPM DIY mencapai 81,09, meningkat 0,44 poin atau 0,55% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi di seluruh dimensi, termasuk angka

harapan hidup bayi yang lahir pada tahun tersebut yang mencapai 75,18 tahun, naik 0,07 tahun dari 2022. Tahun 2024, IPM DIY meningkat menjadi 81,62, menempatkan provinsi ini di posisi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,65%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

Setiap kenaikan IPM sebesar 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,426%. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup mampu mendorong produktivitas serta pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Secara khusus, peningkatan IPM dalam aspek pendidikan dan kesehatan meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). SDM yang lebih berkualitas cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Meskipun IPM DIY tergolong sangat tinggi, tingkat kemiskinan di wilayah ini masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IPM berdampak pada penurunan kemiskinan, efeknya dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketimpangan distribusi pendapatan, struktur ekonomi, dan tingkat investasi daerah. Kota Yogyakarta memiliki IPM yang tinggi karena didukung oleh akses pendidikan yang luas dan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta harapan hidup yang tinggi. Faktor-faktor ini memberikan dasar yang kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Yogyakarta sebagai pusat ekonomi jasa, seperti sektor kuliner, UMKM, dan pariwisata, menciptakan berbagai lapangan kerja informal dan mikro yang menopang kebutuhan dasar masyarakat. Namun, adanya kelompok ekonomi sangat kuat seperti pengusaha properti wisata dan investor dari luar daerah, berdampingan dengan masyarakat berpenghasilan rendah, menyebabkan ketimpangan pendapatan

yang signifikan.

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian metode literatur review ini kami menemukan bahwa kondisi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap menjadi tantangan yang signifikan, meskipun terdapat upaya untuk menurunkannya. Terdapat adanya faktor-faktor seperti pengeluaran per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam dinamika kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada saat ini.

Peningkatan IPM, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan, berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun, ketimpangan pendapatan yang masih tinggi dan disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa solusi yang komprehensif dan berkelanjutan masih diperlukan. Ada beberapa rekomendasi kebijakan meliputi:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan
2. Program-program yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang layak
3. Inisiatif pemerataan pembangunan yang mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Dengan demikian, komitmen serius dan tindakan berkelanjutan diperlukan untuk merealisasikan cita-cita kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan di DIY.

## DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan Dan Fakor-Faktor*

*Penyebabnya.* 1(April), 43–50.

*Jurnal Perspektif,* 18(2), 201–208.

Agung, A. I., & Budiarti, W. (2022). Determinan Kemiskinan di DI Yogyakarta Tahun 2011–2020. *Seminar Nasional Official Statistics, 2022*(1), 343–352. <https://doi.org/10.34123/seminas.offstat.v2022i1.1435>

Bella, P. C., & Huda, S. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi,* 2(2), 480–488.

BPS Provinsi DIY dan Bappeda DIY. (2020). *Analisis Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020.* 1–166.

Fuadi, A., Adha, R., Wati, P., & Harahap, I. (2023). Analisis Deskriptif Mengenai Pendapatan dan Pengeluaran Publik Dalam Kebijakan Fiskal. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah,* 8(2), 1228–1246. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19283>

Indayani, S., & Hartono, B. (2013). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19.

Program, M., Pembangunan, E., Surakarta, U. M., Program, D., Ekonomi, S., Surakarta, U. M., Kerja, U. M., Gini, I., Kerja, U. M., Manusia, I. P., & Terbuka, P. (2024). *YUME : Journal of Management Faktor-Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan di Yogyakarta : Studi Indeks Gini , UMK , IPM , dan Pengangguran ( 2019-2023 ).* 7(3), 807–816.

Salsabilla, A., Juliannisa, I. A., & Tri wahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ikra-Ith Ekonomika,* 5(2), 96–105.

Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik,* 6(1), 45–59.

Saufi, M. S. (2021). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Journal of Chemical Information and Modeling,* 4(2), 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750> <https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728> <http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728%0A> <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766> <https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076>

Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2008).

- Indeks Pembangunan Manusia Manusia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26, 9(1), 18–26. Uny.ac.id
- Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). *Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. 9(1), 2 –36.  
[http://yogyakarta.bpk.go.id/w\\_p-content/uploads/2015/08/Dan-a-Keistimewaan-Yogyakarta](http://yogyakarta.bpk.go.id/w_p-content/uploads/2015/08/Dan-a-Keistimewaan-Yogyakarta)
- Zaqiah, A., Triani, M., & Yeni, I. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(3), 33.  
<https://doi.org/10.24036/jkep.v5i3.15284>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota.  
<https://www.bps.go.id/statistik/cstable/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS Provinsi DI Yogyakarta. (2024). Persentase penduduk miskin.  
<https://yogyakarta.bps.go.id/statistics-table/2/MTQyIzI=/persentase-penduduk-miskin.html>
- DJPb Kementerian Keuangan DIY. (2024). Menatap perekonomian DIY 2024: Tumbuh lebih kuat dan lebih merata.  
<https://djpdb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/artikel/3759-menatap-perekonomian-diy-2024-tumbuh-lebih-kuat-dan-lebih-merata.html>
- Muhammad Jihan Aldi. (2023). Tugas akhir Analisis kemiskinan [PDF]. Universitas Islam Negeri Walisongo.  
[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23694/1/1905026009\\_M.%20Jihan%20Aldi\\_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20Muhammad%20Jihan%20Aldi.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23694/1/1905026009_M.%20Jihan%20Aldi_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20Muhammad%20Jihan%20Aldi.pdf)
- Pemerintah Daerah DIY. (2023). Kemiskinan menurun, ketimpangan menyempit.  
<https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/kemiskinan-diy-menurun-ketimpangan-menyempit>
- Radar Jogja. (2024, Februari 7). Ekonomi DIY tumbuh 5,03 persen di 2024, lapangan usaha konstruksi jadi sumber pertumbuhan tertinggi.  
<https://radarjogja.jawapos.com/jogja/655611142/ekonomi-diy-tumbuh-503-persen-di-2024-lapangan-usaha-konstruksi-jadi-sumber-pertumbuhan-tertinggi>
- Repository Raden Intan Lampung. (2024). Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan menurut perspektif

ekonomi islam di kabupaten lampung tengah tahun 2010-2022, Bab II [PDF]. [https://repository.radenintan.ac.id/1139/3/BAB\\_II.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/1139/3/BAB_II.pdf)

Suara Pasar. (2024, Februari 20). Kabar gembira: Angka kemiskinan dan ketimpangan DIY turun.

<https://www.suarapasar.com/kabar-gembira-angka-kemiskinan-dan-ketimpangan-diy-turun/>

Universitas Ahmad Dahlan. (2024). Naskah publikasi [PDF]. [https://eprints.uad.ac.id/6211/1/9/T1\\_1800010055\\_NASKAH\\_PUBLIKASI\\_240319040122.pdf](https://eprints.uad.ac.id/6211/1/9/T1_1800010055_NASKAH_PUBLIKASI_240319040122.pdf)

BPS Provinsi DI Yogyakarta. (2024). Tingkat terbuka kab/kota. <https://yogyakarta.bps.go.id/index/statistics-table/2/MjkxIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-kab-kot.html>

Aneka Usaha. (2023, Desember 30). Indeks pembangunan manusia DIY tahun 2023.

<https://anekausahakp.com/index-pembangunan-manusia-diy-tahun-2023/>

